

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertukaran data antar-instansi di pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Pada era informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat, fungsi teknologi informasi dan komunikasi yaitu untuk mendukung proses pengiriman dan penerimaan informasi. Fungsi TIK dalam kehidupan manusia adalah sebagai alat untuk mendapatkan informasi data dari bermacam sumber, informasi data menjadi salah satu aset penting dalam mengambil keputusan yang baik dan mendukung pengelolaan sumber daya yang optimal di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengaruh kepemimpinan, kesediaan sumberdaya, dan keluasaan hubungan formal dan informal antar-instansi terhadap pertukaran data antar-instansi di Pemerintah Daerah, dengan mengambil Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan.

Pertukaran informasi/interoperabilitas memungkinkan perolehan, pemerosesan, dan pemantauan informasi di unit kerja yang berbeda untuk pengambilan keputusan yang efektif. Interoperabilitas data dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan pulau informasi yang muncul akibat pengolahan data melalui berbagai sistem elektronik yang digunakan oleh masing-masing instansi pemerintah. Saat ini, sebagian besar distribusi dan pertukaran informasi elektronik antar instansi pemerintah terjadi secara offline (Wicaksana & Rachman, 2018).

Pengelolaan pertukaran informasi juga dapat dilakukan melalui secure state network (PNS-Box), suatu sistem elektronik yang terhubung dengan berbagai platform teknologi, sehingga informasi dapat dibagi dan dipertukarkan antar sistem elektronik lembaga negara lainnya. Data elektronik pemerintah yang dikelola melalui berbagai sistem manajemen basis data dapat diakses dan dibaca oleh sistem elektronik lainnya dengan mengkonversi data tersebut ke dalam format data standar terbuka (XML) yang dapat diidentifikasi melalui API layanan web. Dengan cara ini, transmisi dan pertukaran informasi elektronik antar instansi pemerintah akhirnya dapat dilakukan secara online (Wicaksana & Rachman, 2018).

Di Indonesia, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 95 Tahun 2018, SPBE bertujuan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta pelayanan publik yang bermutu dan terpercaya sesuai sistem pemerintahan elektronik. Untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem e-Government, tata kelola dan pengelolaan sistem e-Government secara nasional juga diperlukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paragraf 4 Pusat Data Nasional Pasal 30 yang membahas terkait penggunaan pusat data nasional dengan tujuan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu pemanfaatan sumberdaya pusat data nasional yang diperoleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, pertukaran data antar-instansi di pemerintah daerah memiliki beberapa potensi kelemahan yang perlu diperhatikan. Beberapa dari kelemahan ini mungkin telah diatasi atau sedang dalam proses perbaikan, tetapi masih penting

untuk diidentifikasi dan diperbaiki agar pertukaran data dapat berjalan lebih efisien dan aman. Beberapa kelemahan umum dalam pertukaran data antar-instansi di pemerintah daerah meliputi:

- 1) Keamanan Data: Salah satu masalah utama adalah keamanan data. Data pemerintah seringkali mengandung informasi yang sensitif, seperti data pribadi warga, data keuangan, atau informasi strategis. Jika sistem pertukaran data tidak cukup aman, maka data ini dapat terancam bocor atau disalahgunakan.
- 2) Kepatuhan Hukum: Pertukaran data pemerintah sering harus mematuhi undang-undang dan regulasi yang ketat. Kelemahan dalam kepatuhan hukum dapat menyebabkan masalah hukum dan pelanggaran privasi.
- 3) Kompatibilitas Sistem: Berbagai instansi pemerintah seringkali menggunakan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda. Ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas yang menghambat pertukaran data yang efisien.
- 4) Standar Data: Kurangnya standar data yang konsisten dapat membuat sulit untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi. Standarisasi data yang buruk dapat menghambat interoperabilitas dan menghambat pertukaran data yang efektif.
- 5) Kurangnya Integrasi: Pertukaran data yang efisien memerlukan integrasi yang baik antara sistem-sistem yang berbeda. Kurangnya integrasi dapat menghambat aliran data yang lancar antar-instansi.

- 6) **Overlapping Data:** Terkadang, berbagai instansi dapat memiliki data yang tumpang tindih atau duplikat. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kebingungan dalam penggunaan data.
- 7) **Keterbatasan Anggaran:** Instansi pemerintah daerah seringkali memiliki anggaran yang terbatas. Ini dapat menghambat pengembangan sistem pertukaran data yang lebih canggih dan aman.
- 8) **Kurangnya Kesadaran:** Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pertukaran data yang efisien dan aman dapat menghambat upaya perbaikan dalam hal ini.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam keamanan teknologi informasi yang kuat, mematuhi regulasi privasi data, mengembangkan standar data yang konsisten, dan meningkatkan koordinasi antar-instansi. Selain itu, promosi kesadaran dan pelatihan bagi personel pemerintah tentang pentingnya pertukaran data yang aman dan efisien juga diperlukan.

Menurut teori instutisional, variable-variabel independen yang berkemungkinan mempengaruhi Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah antara lain kepemimpinan (*Leadership*), kesediaan sumberdaya (*Resource availability*), keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*).

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, tidak luput dari upaya peningkatan kepemimpinan, kesediaan sumberdaya, dan keluasan hubungan formal dan informal antar instansi terhadap pertukaran

data dalam berbagai sektor. Meskipun Kabupaten Bulungan telah melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pertukaran data di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh, perkembangan, dan efektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan seberapa besar pengaruh kepemimpinan, kesediaan sumberdaya dan keluasan hubungan formal dan informal antar instansi terhadap pertukaran data antar instansi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah di Kabupaten Bulungan tahun 2023?
2. Seberapa besar pengaruh kesediaan sumberdaya terhadap pertukaran data antar-instansi di pemerintah daerah di Kabupaten Bulungan tahun 2023?
3. Seberapa besar pengaruh keluasaan hubungan formal dan informal antar-instansi terhadap pertukaran data antar-instansi di pemerintah daerah di Kabupaten Bulungan tahun 2023?
4. Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan, Kesediaan Sumberdaya, dan Keluasaan Hubungan Formal Dan Informal Antar-Instansi Terhadap Pertukaran Data Antar-Instansi Dipemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pertukaran Data Antar-Instansi Dipemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan ditahun 2023.
2. Menjelaskan pengaruh kesediaan sumberdaya Terhadap Pertukaran Data Antar-Instansi Dipemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan ditahun 2023.
3. Menjelaskan pengaruh keluasaan hubungan formal dan informal antar-instansi Terhadap Pertukaran Data Antar-Instansi Dipemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan ditahun 2023.
4. Menjelaskan pengaruh Kepemimpinan, Ketersediaan Sumberdaya, dan Keluasaan Hubungan Formal Dan Informal Antar-Instansi Terhadap Pertukaran Data Antar-Instansi Dipemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan ditahun 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pemerintahan terutama terkait kajian keilmuan yang saling berkesinambungan dengan Pertukaran Data Antar-Instansi Dipemerintah Daerah di Kabupaten Bulungan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini untuk kebijakan pemerintahan Kabupaten Bulungan, terutama terkait pertimbangan agar dapat meningkatkan

sumberdaya dalam pertukaran data antar instansi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.

1.5. Kajian Pustaka (*literature review*)

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Wulandari (2020) meneliti dengan metode konseptual satu data di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu data adalah suatu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengelolaan informasi dalam negeri, berdasarkan satu data maka dibuatlah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan pendataan tersebut.
2. Monepa (2021) meneliti dengan metode research and development di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WMS sangat berguna untuk pertukaran data spasial karena menggunakan aplikasi open source gratis dan mendukung tugas kebijakan penggunaan lahan dan perencanaan wilayah kedua lembaga pertukaran data tersebut.
3. Karlinda *et al* (2021) meneliti dengan metode DevOps. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dokumentasi Aplikasi Pusat Pertukaran Data dan Layanan Pusat Pertukaran Data pada Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
4. Wicaksana & Rachman (2018). Hasil penelitian menunjukkan untuk memperlancar pertukaran informasi antar unit kerja, maka keterhubungan

dan integrasi informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dilaksanakan.

5. Maidiana (2021) meneliti dengan metode studi kepustakaan (library research). Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain survei adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan cara mengajukan pertanyaan menggunakan kuesioner atau wawancara sehingga kemudian menggambarkan berbagai sudut pandang masyarakat umum dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama.
6. Sifa *et al* (2014) meneliti dengan teori atau hipotesis. Artikel ini menjelaskan aspek administratif dalam inisiasi, pelaksanaan dan pengelolaan Bus Pelayanan Pemerintah Daerah (GSB), yaitu pertukaran informasi dan layanan referensi antar instansi pemerintah yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
7. Purwanto; *et al* (2019) meneliti dengan metode kuantitatif. Penelitian ini mencakup kepemimpinan, komitmen dan budaya organisasi yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem manajemen terpadu. Sebaliknya kompetensi dan motivasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem manajemen terintegrasi ISO 9001, ISO 14000 dan ISO 45001.
8. Subidin & Antoni (2022) meneliti dengan metode Network Development Life Cycle (NDLC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan desain koneksi VPN, komunikasi jaringan privat melalui jaringan publik (Internet) lebih aman

untuk menjaga kerahasiaan data. Kualitas pengiriman data berupa gambar, suara dan teks sangat baik dengan kecepatan konstan dan keamanan tetap terjaga. Penggunaan IPv4 untuk menghubungkan jaringan sangat baik karena dapat menjangkau seluruh kantor pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu..

9. Saputro (2016) meneliti dengan metode development or Research and Development (R&D) di Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini menunjukkan proses integrasi data belum terbebas dari kendala-kendala yang mengakibatkan beberapa jenis informasi (informasi tematik pertanahan) yang ditampilkan tidak dapat digunakan untuk tahap analisis sehingga masih perlu dilakukan peninjauan di lapangan.
10. Darono (2017) meneliti dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi terkait di tingkat antar instansi propinsi dan kabupaten/kota di bidang perencanaan belum dapat terlaksana sebagai mana mestinya, walaupun dalam hal iden tifikasi kaitan instansi, menentukan urutan kegiatan setiap instansi, menentukan kegiatan mana yang sama, dan dalam hal mengidentifikasi proyek yang menaruh kepentingan dengan instansi lain telah dilaksanakan.

1.6. Kerangka Teoretik (*theoretical framework*)

Penelitian ini menganut teori institusional. Teori institusional merupakan teori yang banyak digunakan untuk memahami perilaku individu dan organisasi. Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses organisasi. Dalam perkembangannya, teori institusional terbagi menjadi dua kelompok pandangan, yaitu teori institusi lama (OIT) dan teori institusi baru (NIT). OIT berpendapat bahwa pelembagaan terjadi karena adanya nilai-nilai, norma, dan sikap yang diterima begitu saja, sedangkan NIT berpendapat

bahwa pelebagaan terjadi karena organisasi berpikir logis menurut klasifikasi, rutinitas, naskah, skema.

Teori ini mengatakan bahwa fungsi-fungsi organisasi mempengaruhi pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah. Menurut teori ini, variable-variabel yang mempengaruhi pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah meliputi: (1) kepemimpinan (*Leadership*), (2) kesediaan sumberdaya (*Resource availability*), dan (3) keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*).

1.6.1. Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*) (variable Y).

Sifa *et al* (2014) mengemukakan bahwa interoperabilitas data antar pemerintah merupakan suatu kapabilitas sistem informasii pemerntahan yang berguna untuk berinteraksi dan berguna untuki berbagi data pemerintahan dengan antar instansi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*) meliputi: 1) Standarisasi data, 2) Pengelolaan data terpadu, 3) Interoperabilitas teknis, 4) Akses data lintas lembaga, 5) Sistem terhubung.

1.6.2. kepemimpinan (*Leadership*) (variable X1)

Mujiono (2018) mendefinisikan kepemimpinan (*Leadership*) sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (*Leadership*) meliputi: 1) Pendukung normatif isomorfisme, 2) Penegakan isomorfisme kekuasaan, 3) Inovasi isomorfisme mimik.

1.6.3. kesediaan sumberdaya (*Resource availability*) (variable X2)

Cahyo *et al* (2019) mendefinisikan kesediaan sumberdaya (*Resource availability*) sebagai kemampuan suatu entitas, seperti individu, organisasi, atau negara, untuk menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu

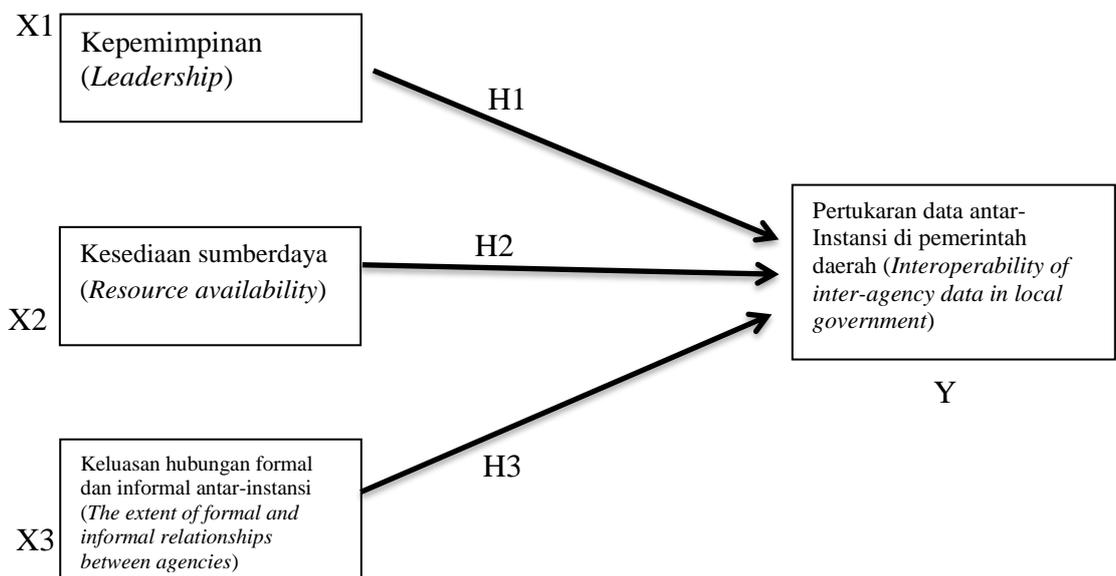
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesediaan sumberdaya (*Resource availability*) meliputi: 1) Alokasi anggaran 2) Tingkat karyawan 3) Investasi infrastruktur teknologi.

1.6.4. keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*) (variable X3)

Nofianti & Qomariah (2017)_mendefinisikan keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*) sering kali mengacu pada kerja sama atau komunikasi yang diatur oleh aturan, peraturan, atau struktur hierarki tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*) meliputi: 1) Tingkat adopsi standar data bersama 2) Frekuensi inisiatif kolaboratif lintas instansi 3) Kepadatan jaringan komunikasi antar-instansi.

Gambar 1. Kerangka Teoretik/Alur berpikir



1.7. Hipotesa

H1: Kepemimpinan (*Leadership*) mempengaruhi Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*).

H2: Ketersediaan sumberdaya (*Resource availability*) mempengaruhi Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*).

H3: Keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*) mempengaruhi Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*).

1.8. Definisi Konsep

1.8.1. Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*) adalah proses berbagi informasi atau data antara berbagai badan atau departemen yang ada dalam pemerintah daerah atau lokal.

1.8.2. Kepemimpinan (*Leadership*) adalah proses atau kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau sebuah kelompok untuk mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan.

1.8.3. Ketersediaan sumberdaya (*Resource availability*) adalah kemampuan atau kesiapan suatu entitas, seperti organisasi, individu, atau pemerintah, untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu.

1.8.4. Keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (*The extent of formal and informal relationships between agencies*) adalah merujuk pada sejauh mana entitas atau organisasi memiliki jaringan dan interaksi resmi (formal) dan tidak resmi (informal) dengan organisasi atau instansi lain.

1.9 Definisi operasional

1.9.1. Pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah (*Interoperability of inter-agency data in local government*) meliputi:

- a) Standarisasi data
- b) Pengelolaan data terpadu
- c) Interoperabilitas teknis
- d) Akses data lintas Lembaga
- e) Sistem terhubung

1.9.2. Kepemimpinan (*Leadership*) meliputi:

- a. Pendukung normatif isomorfisme
- b. Penegakan isomorfisme kekuasaan
- c. Inovasi isomorfisme mimic

1.9.3. Ketersediaan sumberdaya (Resource availability) meliputi:

- a. Alokasi anggaran
- b. Tingkat karyawan
- c. Investasi infrastruktur teknologi

1.9.4. Keluasan hubungan formal dan informal antar-instansi (The extent of formal and informal relationships between agencies) meliputi:

- a. Tingkat adopsi standar data bersama
- b. Frekuensi inisiatif kolaboratif lintas instansi
- c. Kepadatan jaringan komunikasi antar-instansi

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan besaran pengaruh Kepemimpinan, ketersediaan sumberdaya, dan keluasaan hubungan formal dan informal antar instansi terhadap pertukaran data antar instansi di Kabupaten Bulungan, maka penelitian ini bertipe sebagai penelitian survey. Menurut Maidiana (2021) Penelitian survei adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan memintanya menggambarkan berbagai aspek populasi melalui kuesioner atau wawancara.

1.10.2. Populasi (N) dan Sample (n)

Menurut Amin *et al* (2023), populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh *stakeholders* yang berpartisipasi dalam proses pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tahun 2023 sebanyak 94 orang yang terdiri dari dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Instansi yang melakukan pertukaran data dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Menurut Maidiana (2021) terdapat 2 metode pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dan probabilitas sampling. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada probabilitas masing-masing sampel. Metode non-probability sampling mengasumsikan bahwa individu mempunyai peluang yang berbeda-beda untuk menjadi sampel, sedangkan pada metode probabilitas sampling, setiap individu mempunyai potensi atau peluang untuk menjadi sampel sehingga peneliti dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan observasinya dalam sampel berbeda-beda kepada populasi.

1.10.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mukrimaa *et al* (2016) Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengukur data yang akan dikumpulkan. Pengumpulan data yang demikian pada prinsipnya tidak terlepas dari metode pengumpulan datanya. Jika metode pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, maka alat yang digunakan adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Jika metode pengumpulan datanya adalah observasi, maka instrumennya adalah panduan observasi atau panduan observasi terbuka/tidak terstruktur. Begitu pula jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, maka medianya adalah perpustakaan atau format dokumen.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner (angket). Menurut Cahyo *et al* (2019), Kuesioner (kuesioner) adalah suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan bentuk yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh beberapa responden untuk menerima jawaban atau jawaban yang menganalisis pihak-pihak dengan tujuan tertentu, selain itu kuesioner juga merupakan salah satu tekniknya. yang sering digunakan digunakan untuk menilai aktivitas barang atau jasa yang sedang berlangsung.

Jadi penelitian ini menyebarkan kuesioer kepada *stakeholders* yang berpartisipasi dalam proses pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dalam pertukaran data antar instansi dipemerintah daerah. Kuesioner dibuat dalam bentuk kombinasi

google form yang disampaikan ke responden secara elektronik dan dalam bentuk *print-out* yang disampaikan ke responden secara manual.

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan secara purposive (*purposive sampling*). Purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Artinya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada *stakeholders* yang berpartisipasi dalam proses pembentukan struktur organisasi pemerintah daerah, khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, dalam dalam pertukaran data antar instansi di Kabupaten Bulungan.

Teknik pengumpulan data harus dilengkapi oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *stakeholders* yang benar-benar tahu dalam proses pertukaran data antar-Instansi di pemerintah daerah, khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, dalam pertukaran data antar instansi di Kabupaten Bulungan. Selanjutnya peneliti akan mendapatkan berupa dokumen seperti peraturan pemerintah, peraturan bupati, undang-undang, dan berita media masa dan media online yang berkaitan dengan pertukaran data di pemerintah daerah.

1.10.4. Instrumen dan Pengukuran data Penelitian

Menurut Mukrimaa *et al* (2016), Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan wawancara atau observasi untuk memperoleh informasi. Tergantung pada metode yang digunakan, perangkat

tersebut disebut panduan observasi atau panduan wawancara atau kuesioner atau panduan dokumen.

Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup, menurut Danuri & Maisaroh (2019) adalah tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Pengukuran data adalah proses untuk mengukur atau menilai kuantitas atau karakteristik tertentu dari suatu objek atau fenomena menggunakan instrumen atau metode yang sesuai (Maidiana, 2021).

Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk pengukuran datanya. Skala Likert digunakan untuk menentukan respon dari para responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu 1 sangat tidak setuju (sangat tidak benar kenyataannya), 2 tidak setuju (tidak benar kenyataannya), 3 netral (agak benar kenyataannya), 4 setuju (benar kenyataannya), dan 5 sangat setuju (sangat benar kenyataannya).

1.10.5. Teknik analisa data

Teknik analisis data adalah upaya mencari dan mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diselidiki dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, SEM-PLS digunakan untuk menganalisis data. PLS-SEM merupakan metode alternatif pengganti OLS, mikroekonometri, time series, dan quasi-structural

Equation Modelling (SEM), suatu metode analisis multivariat yang sering digunakan untuk membangun dan menguji model statistik berupa model kausal. SEM menggabungkan aspek analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori untuk memperhitungkan keterbatasan model ini. SEM digunakan untuk menilai hubungan antara variabel laten dan manifes serta menilai kualitas model yang dibangun (Tanzeh & Arikunto, 2004).

SEM-PLS dalam penelitian ini untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji regresi dan hipotesis. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji Reliabilitas adalah uji yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya dilapangan, Reliabilitas juga merupakan konsistensi suatu rangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Uji regresi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara suatu variabel tunggal, yaitu suatu variabel yang dapat dijelaskan oleh satu atau lebih variabel, yaitu. variabel penjelas. Jika hanya ada satu variabel bebas maka analisis regresinya disebut regresi sederhana. Pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dari eksperimen terkontrol dan observasi.